

Sidang Korupsi Batal, Kimha Sakit

Tiga kali dijadwalkan, namun tiga kali juga sidang dibatalkan. Kimha masih belum dituntut. Dua lainnya telah divonis. Bagaimana kinerjanya sebagai Kepala Dinas?

PONTIANAK. Sidang tuntutan terhadap Cornelius Kimha, salah seorang terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian Hansip di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jumat (8/7) batal digelar. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar itu beralasan sakit.

"Ditunda karena Pak Kimha sakit," kata Ambo Mangan, kuasa hukum Kimha kepada sejumlah wartawan di kantor PN Pontianak, Jumat pagi (8/7).

Sidang Kimha rencananya dilaksanakan pukul 09.00. Sejak pagi,

sejumlah wartawan baik media cetak maupun elektronik sudah menunggu di kantor PN Pontianak untuk mengikuti proses sidang tersebut. Sejumlah aparat kepolisian berpakaian seragam dan sipil juga sudah berjaga-jaga.

"Sakit (terdakwa, red) dalam KUHAP tidak bisa sidang. Pak Kimha sakit sudah satu pekan terakhir. Rencananya akan segera diopname. Sakit karena komplikasi," kata Ambo.

Batalnya sidang tuntutan ini, bukan baru kali ini terjadi. Hingga kemarin,

penundaan sidang pembacaan tuntutan untuk Kimha sudah yang ketiga kalinya. Penundaan pembacaan tuntutan pertama kali, Senin (4/7) lalu, namun ditunda karena JPU sedang memproses rencana tuntutan.

Saat itu, sidang dijadwalkan ulang Rabu (6/7), namun kembali ditunda karena terdakwa sakit. Karena itu, sidang kemudian kembali dijadwalkan kemarin. Namun lagi-lagi rencana sidang tersebut harus ditunda.

Padahal majelis hakim, dipimpin Ha-

kim Ketua Yunus Sesa SH MH dibantu hakim anggota Agung Purbantoro SH MH dan Imam Supardi SH MH, serta Panitera Pengganti, Irma H SH sudah menunggu. Demikian juga JPU yang diwakilkan Tri Lestari.

Menurut Ambo, terdakwa sakit akibat tekanan darah tinggi dan kolesterol yang naik. Namun secara umum sakitnya terdakwa lebih kepada komplikasi beberapa macam penyakit yang dideritanya. Sayang, Ambo tidak mengungkapkan apa sakit yang diderita terdakwa

tersebut.

Ambo memastikan, sakit yang diderita kliennya bukan rekayasa. Ia mengaku telah mengantongi surat keterangan sakit dari dokter. "Surat itu akan kita serahkan kepada majelis hakim sebagai bukti mengenai kondisi yang sedang dialami klien saya," janji Ambo tanpa menunjukkan surat sakit itu kepada wartawan.

Diakui Ambo, bila mengacu kepada jadwal sidang, agenda sudah memasuki

Halaman

EQuator
Sabtu, 9 Juli 2011

Sidang Korupsi

pada tahap pembacaan tuntutan. "Seharusnya agenda tuntutan JPU. Tapi terdakwa sedang sakit jadi tidak bisa mengikuti persidangan," tukasnya sembari mengatakan terdakwa sedang menjalani perawatan intensif di rumah.

Kimha merupakan satu dari empat orang yang diduga terlibat dalam korupsi pakaian Hansip di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalbar tahun 2008-2009. Tiga lainnya adalah Rukasi, Tonny Ferdy, dan Danal Ginanjar.

Pada tahun 2008, Kimha sempat menjabat sebagai Plt Kepala Kesbangpolinmas Kalbar. Karena ulah keempat orang ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar menemukan kerugian Negara hingga miliaran

rupiah.

Rukasi yang berperan sebagai Ketua Panitia Lelang sudah divonis, 2,5 tahun penjara. Tonny Ferdy yang menjabat sebagai pengguna anggaran alias Kepala Kesbangpolinmas Tahun 2009 divonis 2 tahun penjara.

Sementara untuk proses sidang Danal Ginanjar yang menjabat sebagai Direktur PT Putracoutama yang memenangkan tender pengadaan itu, masih sedang berjalan. Dalam waktu dekat juga akan memasuki tahap tuntutan.

Pada sidang perdana Selasa (11/1), Kimha dijerat tiga pasal. Tiga pasal yang diterapkan tersebut adalah dakwaan primer, pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Ta-

.... dari halaman 1

hun 2001.

Dakwaan subsider, pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Lebih subsider, Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalbar tanggal 8 Oktober 2010, terdapat kerugian negara akibat kemahalan harga (markup). Khusus pengadaan tahun 2008 alias yang melibatkan Kimha saja, nilai markup berdasarkan perhitungan BPKP Kalbar mencapai Rp 1.394.673.400. (bdu)